

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

2.5 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Bank Umum Syariah Indonesia

Ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini yaitu :

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No. 14 Tahun 1967.
2. Konsep bank syariah dari segi politisi berkonotasi ideologis dan merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam venture semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberlisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu beerusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-20 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990 dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Deregulasi finansial yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini agaknya sejalan dengan deregulasi finansial yang juga terjadi di negara-negara Asia. Persamaannya terlihat pada tiga dimensi deregulasi yang terpisah, namun berkaitan erat, yaitu : deregulasi harga (terutama deregulasi suku bunga), deregulasi produk (ragam jasa yang ditawarkan), deregulasi special (kelonggaran pembukaan cabang, atau hambatan memasuki pasar).Tinjauan deregulasi selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa deregulasi telah sedikit banyak mengubah “wajah” sektor keuangan Indonesia. Tidak berlebihan bila dikatakan saat ini Indonesia telah keluar dari represi finansial. Sebagai gantinya, mengakibatkan fenomena baru yang membawa iklim persaingan semakin hangat. Termasuk di dalamnya adalah persaingan dalam perbankan di Indonesia.

Diakui atau tidak, deregulasi finansial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syariah yaitu BPR Syariah Dana Mardlotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera. Keduanya berada di Bandung. Setelah itu baru kemudian pada tahun 1992, diundangkan UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992, yang isinya tentang bank bagi hasil. Saat itu pula berdiri Bank Muamalat Indonesia. Kemudian diikuti oleh BPR Syariah Bangun Drajat Warga dan BPR Syariah Margi Rizki Bahagia, keduanya berada di Yogyakarta. Reaksi berikutnya juga muncul untuk melakukan revisi UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional, dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Setelah UU No. 10 Tahun 1998 di Indonesia telah berdiri satu Bank Umum Syariah (Bank Muamalat Indonesia) ditambahkan dengan 80 BPR Syariah.

Adanya UU No. 10 Tahun 1998 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan. Terutama bagi dunia perbankan syariah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada seperti Bank Umum Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Pendirian bank Islam diprakarsai oleh MUI saat menyelenggarakan Lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam

pada saat Musyawarah Nasional IV tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Munas mengamanahkan agar membentuk kelompok kerja guna mendirikan bank Islam di Indonesia dengan tugas melakukan pendekatan dan konsultasi.¹

4.1.2 Profil Obyek Penelitian

4.1.2.1 Sejarah singkat Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang di dominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

¹ Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, Cet ke-3, Semarang, LPSDM. RA. Kartini, 2010, h. 7

Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang memiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank

Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/ KEP.DGS/ 1999, Bi menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara ideallisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama mmbangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

4.1.2.2 Produk Bank Syariah Mandiri

Produk Bank Syariah Mandiri pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu produk bagi penyimpanan dana atau biasa disebut pendanaan dan produk bagi pengelola dana atau biasa disebut produk pembiayaan. Pada penelitian ini produk yang digunakan adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

1. BSM Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2. BSM Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3. BSM Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

4. BSM Pembiayaan Talangan Haji

Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.

5. BSM Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan pengadaan barang dengan skema *Istishna* adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (*obyek istishna*), di mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*goods in process financing*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran,

baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

6. Pembiayaan dengan Skema IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*)

Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewaan antara Bank dan Nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.

7. Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* adalah penyaluran dana *Mudharabah Muqayyadah* di mana bank bertindak sebagai agen (channelling agent), sehingga bank tidak menanggung risiko.

8. BSM *Customer Network Financing*

BSM *Customer Network Financing* (BSM-CNF) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah (agen, dealer, dan sebagainya) untuk pembelian persediaan/*inventory* barang dari rekanan (ATPM, produsen/distributor, dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan bank.

9. BSM Pembiayaan Resi Gudang

Pembiayaan resi gudang adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/ produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen.

10. BSM Pembiayaan Edukasi

Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

11. PKPA

Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggota (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

12. BSM Implan

Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan/anggota Kopkar yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif).

13. Pembiayaan Dana Berputar

Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

14. BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, dengan sistem murabahah.

15. BSM Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah

Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang coverage atas agunannya masih dapat meng-cover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan debt to service ratio nasabah.

Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Bersubsidi. Pembiayaan untuk pemilikan/pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan subsidi uang muka dari pemerintah, yang ditujukan kepada golongan berpendapatan tetap (pegawai/karyawan).

16. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umroh lainnya dengan ijarah.

17. BSM Pembiayaan Griya DP 0%

Pembiayaan Griya BSM tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah, di mana nilai pembiayaan adalah sebesar 100% dari harga transaksi rumah.

18. BSM Sistem Pembayaran *Off Line*

Sistem pembayaran BSM secara off line yang dapat digunakan oleh institusi yang memiliki pelanggan yang banyak untuk melakukan pembayaran dari pelanggan institusi di seluruh konter BSM.

19. Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri

Pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*cashcollateral*) dimana pemilik dana (investor) memberikan batasan kepada Bank mengenai tempat, cara dan objek investasinya.

20. Pembiayaan kepada Pensiunan

Penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan langsung uang pensiun yang diterima bank setiap bulan (pensiun bulanan).

21. Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional dibidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan baru penunjang kerja.

4.1.2.3 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

➤ Visi

Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

➤ Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumerdan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat.

4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.²

4.1.2.4 Profil Bank Syariah Mandiri

Nama:	PT Bank Syariah Mandiri
Alamat:	Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia
Telepon:	(62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting)
Faksimili:	(62-21) 3983 2989
Situs Web:	www.syariahmandiri.co.id
Tanggal Berdiri:	25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi:	1 November 1999
Modal Dasar:	Rp2.500.000.000.000,-
Modal Disetor:	Rp858.243.565.000,-
Kantor Layanan:	630 kantor, yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia

² www.syariahmandiri.co.id

Jumlah jaringan 598 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 8,993, ATM BSM: ATM Bersama 33,558 unit (*include* ATM Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima 23,477 unit, EDC BCA 121,743 unit, ATM BCA 8,350 dan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) 7,435 unit.

Jumlah 13.185 orang (Per November 2011)
Karyawan:

B. Kepemilikan

Saham

1.PT.Bank 131.648.712 lembar saham (99,999999%)

Mandiri

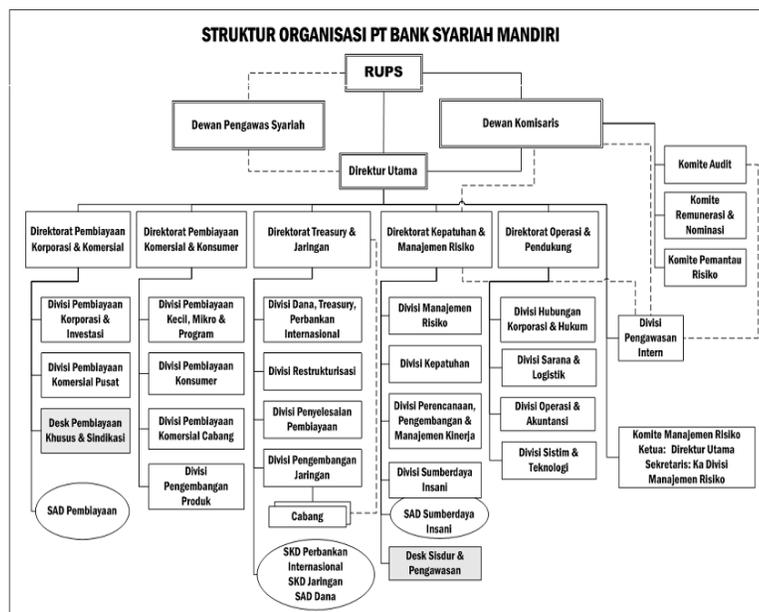
(Persero)Tbk.:

2.PT.Mandiri 1 lembar saham (0,000001%).

Sekuritas:

4.1.2.5 Struktur Bank Syariah Mandiri

Gambar 1.1



4.1.2.6 Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Ide pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya “Bunga bank dan Perbankan” yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertempat di Cisarua, Bogor tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Ide ini kemudian dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Jakarta tanggal 22 – 25 Agustus 1990. Bank Muamalat Indonesia melalui kegiatan operasinya pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa

pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.³

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian besar Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet disegmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik rendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.⁴

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development*

³ <http://www.muamalatbank.com> , h. 42

⁴ *Ibid*, h. 43

Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi usaha yang tepat, serta kepatuhan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.⁵

4.1.2.7 Produk Bank Muamalat Indonesia

Produk Bank Muamalat Indonesia pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu produk bagi penyimpanan dana atau biasa disebut pendanaan dan produk bagi pengelola dana atau biasa disebut produk pembiayaan. Pada penelitian ini produk yang digunakan adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang terdapat pada Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Konsumen
 1. Pembiayaan Hunian Syariah
 2. AutoMuamalat
 3. Dana Talangan Porsi Haji
 4. Pembiayaan Muamalat Umroh
 5. Pembiayaan Anggota Koperasi

⁵ *Ibid*

b. Modal Kerja

1. Pembiayaan Modal Kerja
2. Pembiayaan LKM Syariah
3. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

c. Investasi

1. Pembiayaan Investasi
2. Pembiayaan Hunian Syariah Bisn

4.1.2.8 Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia ⁶

➤ **Visi**

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominasi di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional.

➤ **Misi**

Menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.

4.1.2.9 Profil Bank Muamalat Indonesia ⁷

Nama : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

⁶ Ibid. h. 48

⁷ Ibid. h. 52

Alamat : Gedung Arthaloka Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220

Telepon : (62) (21) 2511414,2511470,2511451

Faksimile : (62) (21) 2511465, 2511453

Website : www.muamalatbank.com

Tanggal Berdiri : 1 November 1991

Tanggal Beroperasi : 1 Mei 1992

Jenis Usaha : Perbankan Syariah

Jaringan Layanan : 75 kantor cabang, 92 kantor cabang pembantu, 158
kantor kas, 43 gerai, 4.103 SOP POSS, 172 ATM
Muamalat.

4.1.2.10 Struktur Bank Muamalat Indonesia

1. Dewan Pengawas Syari'ah:

KH. M. A. Sahal Mahfudh (Ketua)

KH. Ma'ruf Amin (Anggota)

Prof. Dr. Umar Shihab (Anggota)

Prof. Dr. H. Muardi Chatib (Anggota)

2. Dewan Komisaris :

Drs. H. Abbas Adhar (Komisaris Utama)

Prof. Korkut Ozal (Komisaris)

DR. Ahmed Abisoursour (Komisaris)

H. Iskandar Zulkarnain, SE. Msi (Komisaris)

Drs. Aulia Pohan, MA (Komisaris)

3. Direksi :

H.A. Riawan Amin, MSC (Direktur Utama)

Ir. H. Arviyan Arifin (Direktur)

H. M. Hidayat, SE, Ak. (Direktur)

Ir. H. Andi Buchari, MM (Direktur)

Drs. U. Saefudin Noer (Direktur)

4. Kepala Grup :

Afrid Wibisono (Administration)

Avantiono Hadhianto (Business Development)

Muchtar MD. Siswoyo (Financing Support)

Zulkarnain Hasabuan (Internalaudit)

5. Rapat Umum Pemegang Saham (*Shareholders Meeting*)

RUPS adalah dewan tertinggi yang ada di Bank Muamalat Indonesia.

Tugasnya memimpin rapat pemegang saham serta mengawasi jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia.

6. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*)

Dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama Dewan Direksi merumuskan

strategi jangka panjang perusahaan. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi.
- 2) Melakukan tugas-tugas secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar.
- 3) Melakukan pengawasan atas tugas-tugas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dasar Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- 6) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- 7) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan tugas lain yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan.

7. Dewan Pengawas Syari'ah (*Sharia Supervisory Board*)

Dewan Pengawas Syari'ah dalam organisasi bank bersifat independen dan terpisah dari pengurus bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional Bank. Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syari'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan atas produk Perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari'ah.
- 2) Memberikan pedoman dan garis-garis besar Syari'ah.
- 3) Mengadakan perbaikan atas produk yang tidak sesuai dengan Syari'ah.
- 4) Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa atas permasalahan yang dihadapi pihak eksekutif dan operasi.
- 5) Memeriksa Buku Laporan Tahunan dan kesesuaian Syari'ah disemua produk dan operasi selama tahun berjalan.
- 6) Memberikan nasihat kepada Direksi dan Komisaris agar seluruh kegiatan Perbankan sesuai dengan Syari'ah Islam.

8. *Operation Director*

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuat kebijaksanaan khususnya dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan bawahan serta pengawasan kegiatan operasional. Tugas pokok direksi adalah:

- 1) Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan.
- 2) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

9. Administration Group

Ruang lingkup kerja:

- 1) Melakukan supervisi dan monitoring terhadap segenap Kantor Cabang atas pelaksanaan atau jalannya operasional.
- 2) Melakukan konsolidasi terhadap pembuatan dan *monitoring* Laporan-laporan Bulanan Keuangan Bank dan menyampaikannya pada pihak intern atau ekstern yang berkepentingan.
- 3) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan repegawaiitmen dan seleksi calon karyawan, proses administrasi kegiatan penempatan dan penempatan kembali karyawan, proses terminasi atau pengunduran diri karyawan serta memonitor dan memeliharaa *data base* kepersonaliaan.
- 4) Melakukan proses dan administrasi pembiayaan karyawan, pembayaran gaji serta pembayaran JAMSOSTEK dan pajak (pph 21) seluruh karyawan serta pengurus Bank.
- 5) Melakukan koordinasi dalam penyediaan sarana logistik dalam rangka persiapan pembukaan atau pengembangan Kantor Cabang meliputi jaringan komuniaksi dan sarana penunjang operasional

lainnya.

- 6) Melakukan koordinasi terhadap pengelola sistem komunikasi data untuk mendukung operasional *online* pusat pengolahan data keseluruhan Cabang Bank Muamalat Indonesia serta berkoordinasi dengan pihak ekstern.

10. Corporate Support Group

Ruang lingkup kerja:

- 1) Menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen.
- 2) Memberikan masukan dalam penyusunan manual, prodik, akad, dan keputusan yang terkait dengan aspek hukum.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dalam positif masyarakat tentang Bank Muamalat Indonesia.
- 4) Membangun pendekatan dan citra positif Bank Muamalat Indonesia pada *emotional market*.
- 5) Meraih dukungan moril maupun materil dari *stakeholder* maupun *new investor*.

11. Internal Audit Group

Ruang lingkup kerja:

- 1) Berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit.

- 2) Memeriksa dan menilai atas kecukupan dari struktur pengendalian intern.
- 3) Memeriksa dan menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah dilaksanakan.
- 4) Memberikan saran perbaikan baik untuk kecukupan dan efektifitas atau kehandalan struktur pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan.
- 5) Memberikan informasi dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya menjadikan Bank lebih maju.

12. Business Development Group

Ruang lingkup kerja:

A. Marketing:

- 1) *Marketing plan* dan *marketing strategy* sebagai *guidance* bagi Cabang.
- 2) Bersama *financing* dan *sattlement group* membuat *target lending* dan *funding revenue system* dan *technology*.
- 3) Melakukan pengembangan sistem dan teknologi untuk mendukung operasional Bank.

B. Produk dan Development:

- 1) Melakukan riset, survey, dan pengembangan produk.

2) Melakukan *review* produk dan fitur produk.

3) Merumuskan tarif layanan produk.

C. *SISOP* dan UAT (*USSER acceptance Test*)

1) Merencanakan, menyusun atau membuat dan memperbaiki prosedur peraturan atau kebijakan pribadi.

2) Menyebarkan ketentuan pemerintah seperti SEBI, PP, Undang-undang dan sejenisnya untuk bidang operasi Bank.

3) Sosialisasi dan implementasi prosedur yang telah dibuat dan direvisi.

4) Memantau dan melakukan *supervise* terhadap layanan dan operasi selindo, sehingga kualitas layanan dan operasi dapat dipenuhi.

5) Melakukan UAT atas produk atau program yang akan diluncurkan dan disesuaikan dengan manual operasi yang dibuat.

13. *Financing Support Group*

Ruang lingkup kerja:

1) *Financing Supervision*

2) *Sharia Financial Institution*

3) *Financing Product Development*

14. *Network and Alliance Group*

Ruang lingkup kerja:

- 1) *Network Alliance* (POS, DA'I MUAMALAT, PEGADAIAN)
- 2) *Shar-E and Gerai Optimizing*
- 3) *Virtual Banking Operations* (Call Center and Card Center)

4.2 Analisis Data

1.1.1 Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau member gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁸

1.1.1.1 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Rasio KPMM

Dalam penellitian ini tingkat rasio KPMM diperoleh dari Laporan Keuangan sampel bank umum syariah selama Januari 2009 sampai Agustus 2011.

Tabel 1.5
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
X1	56	6	10	17	12.57	1.438	.750	.319	-.127	.628
Valid N (listwise)	56									

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder

Hasil statistik deskriptif variabel KPMM pada Bank Umum Syariah bahwa terendah dari periode Januari 2009 – Agustus 2011 yang terjadi pada bulan

⁸ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-18, 2011, h.29

Desember 2009 dengan 10%. Dan pencapaian tertinggi dari periode Januari 2009 – Agustus 2011 yang terjadi pada bulan Maret 2011 dengan 17%. Hasil tampilan output SPSS memberikan nilai *skewness* dan *kurtosis* masing-masing 0,750 dan -0,127 sehingga dapat disimpulkan bahwa data KPMM terdistribusi secara normal.

1.1.1.2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Rasio KAP

Tabel 1.6
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
X2	56	10.8600	86.5300	97.3900	94.790661	1.8039814	-1.807	.319	6.604	.628
Valid N (listwise)	56									

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder

Hasil statistik deskriptif variabel KAP pada Bank Umum Syariah bahwa terendah dari periode Januari 2009 – Agustus 2011 yang terjadi pada bulan Oktober 2009 dengan 86.53%. Dan pencapaian tertinggi dari periode Januari 2009 – Agustus 2011 yang terjadi pada bulan Desember 2010 dengan 97,39%. Hasil tampilan output SPSS memberikan nilai *skewness* dan *kurtosis* masing-masing -1,807 dan 6,604 sehingga dapat disimpulkan bahwa data KAP tidak terdistribusi secara normal.

1.1.1.3 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Rasio NOM

Tabel 1.7

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
X3	56	30.5000	.5100	31.0100	7.03857	5.2301804	2.532	.319	8.778	.628
Valid N (listwise)	56				1					

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder

Hasil statistik deskriptif variabel NOM pada Bank Umum Syariah bahwa terendah dari periode Januari 2009 – Agustus 2011 yang terjadi pada bulan April 2010 dengan 0,5100%. Dan pencapaian tertinggi dari periode Januari 2009 – Agustus 2011 yang terjadi pada bulan November 2009 dengan 31.0100%. Hasil tampilan output SPSS memberikan nilai *skewness* dan *kurtosis* masing-masing 2,532 dan 8,778 sehingga dapat disimpulkan bahwa data NOM tidak terdistribusi secara normal.

1.1.1.4 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Rasio STM

Tabel 1.8

Descriptive Statistics											
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Y	56	146155 86	5099316	19714902	10793043.95	4743494.914	2.250E13	.458	.319	-1.227	.628
X4	56	18.9232	2.9614	21.8846	9.533604	4.5207762	20.437	1.022	.319	.479	.628
Valid N (listwise)	56										

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder

Hasil statistik deskriptif variabel STM pada Bank Umum Syariah bahwa terendah dari periode Januari 2009 – Agustus 2011 yang terjadi pada bulan April 2009 dengan 2.9614. Dan pencapaian tertinggi dari periode Januari 2009 – Agustus 2011 yang terjadi pada bulan Agustus 2011 dengan 21.8846. Hasil tampilan output SPSS memberikan nilai *skewness* dan *kurtosis* masing-masing 1,022 dan 0,479 sehingga dapat disimpulkan bahwa data STM terdistribusi secara normal.

1.1.1.5 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Pembiayaan Bank Umum Syariah

Tabel 1.9

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Y	56	14615586	5099316	19714902	10793043.95	4743494.914	.458	.319	-1.227	.628
Valid N (listwise)	56									

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder

Hasil statistik deskriptif variabel pembiayaan pada Bank Umum Syariah bahwa terendah dari periode Januari 2009 – Agustus 2011 yang terjadi pada bulan Januari 2009 dengan Rp 5.099.316. Dan pencapaian tertinggi dari periode Januari 2009 – Agustus 2011 yang terjadi pada bulan Agustus 2011 dengan Rp 19.714.902. Hasil tampilan output SPSS memberikan nilai *skewness* dan *kurtosis* masing-masing 0,458 dan -1,227 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pembiayaan pada Bank Umum Syariah terdistribusi secara normal.

1.1.2 Uji Asumsi Klasik

1.1.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji *multikolinieritas* bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 2.0
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.614	1.629
	X2	.808	1.237
	X3	.918	1.089
	X4	.552	1.811

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder

Dari hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya 95%. Hasil perhitungan nilai VIF untuk variabel tingkat KPMM, tingkat KAP, tingkat NOM, dan tingkat STM sangat jauh dari 10. Jadi dapat disimpulkan tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam regresi.

1.1.2.2 Uji Autokorelasi

Uji *Autokorelasi* dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) yang biasa muncul dalam penelitian *time series*. Pengujian adanya *autokorelasi* dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW test).

Tabel 2.1**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.640 ^a	.410	.364	3784058.479	.681

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

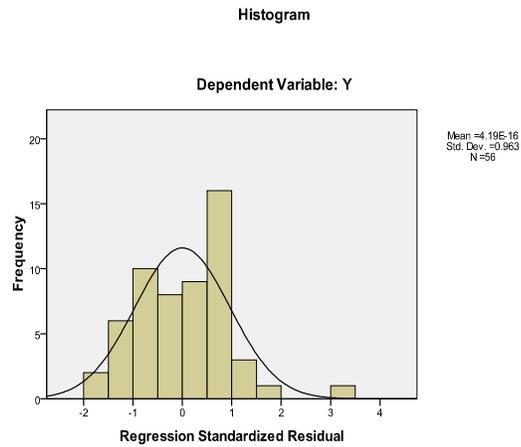
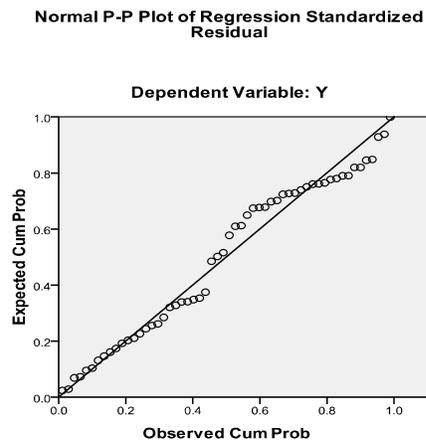
Sumber: Hasil pengolahan data sekunder

Nilai DW sebesar 0,681 nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel 56 (n) dan jumlah variabel independen 4 (K= 4), maka dalam tabel DW akan didapat $D_l = 1,414$ dan $D_u = 1,724$. Berdasarkan tabel keputusan *autokorelasi* bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada *autokorelasi* positif, karena $0 \leq d \leq d_l$ atau $0 \leq 0,681 \leq 1,414$.

1.1.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.⁹ Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik.

⁹ *Ibid*, h. 147.

Grafik 1.0**Grafik 1.1**

Dari grafik histogram atau grafik normal terlihat bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke kanan atau ke kiri. Pada grafik normal probability plots titik-titik terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun bawah angka 0 pada sumbu y.

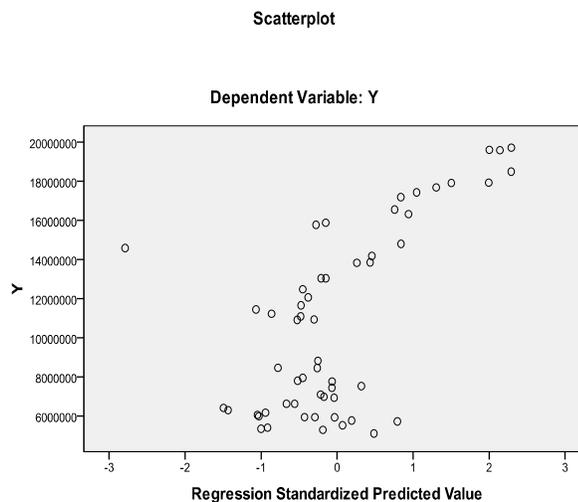
1.1.2.4 Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dasar analisis adalah :

- a. jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Grafik 1.2



Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta baik diatas maupun bawah angka 0 pada sumbu y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi *heteroskedastiditas*.

1.2 Uji Hipotesis

1.2.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis data dan penyajian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda, dimana dalam analisis regresi tersebut akan menguji rasio keuangan bank syariah terhadap pemberian pembiayaan di bank umum syariah. Pengolahan data menggunakan bantuan program komputer SPSS versi 17.00 berdasarkan data-data yang diperoleh dari laporan keuangan.

Tabel 2.2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.624E7	2.926E7		-2.605	.012
	X1	405795.565	452891.328	.123	.896	.374
	X2	810945.655	314593.688	.308	2.578	.013
	X3	-10006.380	101801.856	-.011	-.098	.922
	X4	538185.501	151869.113	.513	3.544	.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder

Hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk variabel bebas X1 = 405795.565, X2 = 810945.655, X3 = -10006.380, dan X4 = 538185.501 dengan konstanta sebesar -76240000 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = -76240000 + 405795.565X1 + 810945.655X2 - 10006.380X3 + 538185.501X4$$

Dimana :

Y = pembiayaan

X1 = rasio KPMM

X2 = rasio KAP

X3 = rasio NOM

X4 = rasio STM

- a. Konstanta sebesar -76240000 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata pembiayaan sebesar 76240000
- b. Koefisien regresi X1 (KPMM) dari perhitungan linier berganda dapat dilihat 405795.565 hal ini berarti setiap ada peningkatan KPMM sebesar 1 poin maka volume Pembiayaan akan meningkat sebesar 405795.565.
- c. Koefisien regresi X2 (KAP) dari perhitungan linier berganda dapat dilihat 810945.655 hal ini berarti setiap ada peningkatan KAP sebesar 1 poin maka berpengaruh pada pembiayaan pada bank umum syariah.
- d. Koefisien regresi X3 (NOM) dari perhitungan linier berganda dapat dilihat -10006.380 hal ini berarti setiap ada peningkatan NOM sebesar 1 poin maka volume pembiayaan pada bank umum syariah akan menurun atau berkurang sebesar 10006.380 juta. Tingkat NOM dan volume pembiayaan pada bank umum syariah terjadi hubungan negatif. Hal ini sesuai dalam teori permintaan dimana ketika harga barang naik maka permintaan akan barang tersebut menurun. Dalam penelitian ini ketika tingkat NOM itu

naik maka pemberian pembiayaan bank umum syariah akan mengalami penurunan.

- e. Koefisien regresi X4 (STM) dari perhitungan linier berganda dapat dilihat 538185.501 hal ini berarti setiap ada peningkatan STM sebesar 1 poin maka volume Pembiayaan akan meningkat sebesar 538185.501

1.2.2 Uji Parsial

Uji t (uji parsial) statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji ini menandai bahwa variabel independen adalah rasio keuangan bank syariah dan variabel dependen adalah pembiayaan. Dalam model ini apakah rasio keuangan bank syariah berpengaruh terhadap pembiayaan di bank umum syariah.

Tabel 2.3

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.887E7	5569095.706		3.388	.001
X1	-642602.369	440314.661	-.195	-1.459	.150

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS ver. 17.00 dapat diketahui bahwa uji parsial untuk variabel X1 (KPMM) diperoleh t_{hitung} sebesar -1.459 dengan signifikansi 0,150. Nilai signifikansi lebih besar 0,05 ($0,150 > 0,05$) maka diperoleh t_{tabel} dengan $df = 52$ adalah sebesar 1.675. maka diperoleh t_{hitung} (-1.459) $< t_{tabel}$ (1.675) sehingga H_0 diterima dan menolak H_a . Maka tingkat KPMM berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan Bank umum syariah.

Tabel 2.4**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.108E8	2.962E7		-3.740	.000
	X2	1282456.404	312379.146	.488	4.105	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS ver. 17.00 dapat diketahui bahwa uji parsial untuk variabel X2 (KAP) diperoleh t_{hitung} sebesar 4.105 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih besar 0,05 ($0,000 > 0,05$) sehingga H_0 diterima dan menolak H_a . Maka tingkat KAP berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan Bank umum syariah.

Tabel 2.5**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.111E7	1077494.227		10.312	.000
	X3	-45148.086	123266.798	-.050	-.366	.716

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS ver. 17.00 dapat diketahui bahwa uji parsial untuk variabel X3 (NOM) diperoleh t_{hitung} sebesar -0.366 dengan signifikansi 0,716. Nilai signifikansi lebih besar 0,05 ($0,716 > 0,05$)

sehingga H_0 ditolak dan menerima H_a . Maka tingkat NOM tidak berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan Bank umum syariah.

Tabel 2.6

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5275839.824	1254640.739		4.205	.000
	X4	578711.278	119105.582	.552	4.859	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS ver. 17.00 dapat diketahui bahwa uji parsial untuk variabel X4 (STM) diperoleh t_{hitung} sebesar 4.859 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih besar 0,05 ($0,000 > 0,05$) sehingga H_0 diterima dan menolak H_a . Maka tingkat STM berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan Bank umum syariah.

1.2.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar prosentase kontribusi variabel bebas rasio keuangan bank syariah terhadap pemberian pembiayaan di bank umum syariah. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 2.7

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.640 ^a	.410	.364	3784058.479	.681

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder

Dari tampilan output SPSS menunjukkan besarnya adjusted R^2 adalah 0,364, hal ini berarti pemberian pembiayaan Bank Umum syariah dapat dijelaskan oleh variabel tingkat KPMM, variabel tingkat KAP, variabel tingkat NOM, dan variabel tingkat STM sebesar 36,4% sedangkan sisanya ($100\% - 36,4\% = 63,3\%$) dijelaskan oleh variabel lain.

1.2.4 UJI F

Uji hipotesis secara simultan (Uji F) antara variabel bebas dalam hal ini rasio keuangan bank syariah dan variabel terikatnya adalah terhadap pemberian pembiayaan di bank umum syariah. Hasil analisis uji F dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 2.8

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.073E14	4	1.268E14	8.856	.000 ^a
	Residual	7.303E14	51	1.432E13		
	Total	1.238E15	55			

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder

Uji F menghasilkan F_{hitung} sebesar 8.856 dengan nilai signifikan 0,000, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan menolak H_a . Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara tingkat KPMM (X1), tingkat KAP (X2), tingkat NOM (X3), dan tingkat STM (X4) secara bersama-sama terhadap penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah.

1.3 Pembahasan

1.3.1 Pengaruh Rasio Keuangan Bank Syariah Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Study Pada Bank Umum Syariah)

1.3.1.1 Pengaruh rasio permodalan (KPMM) terhadap penyaluran pembiayaan di bank umum syariah

Tingkat rasio permodalan (KPMM) menunjukkan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan di bank umum syariah. Hal ini dapat dilihat pada uji parsial untuk variabel X1 (KPMM) diperoleh t_{hitung} sebesar -1.459 dengan signifikansi 0,150. Nilai signifikansi lebih besar 0,05 ($0,150 > 0,05$) maka diperoleh t_{tabel} dengan $df = 52$ adalah sebesar 1.675. maka diperoleh $t_{hitung} (-1.459) < t_{tabel} (1.675)$ sehingga H_0 diterima dan menolak H_a . Maka tingkat rasio permodalan (KPMM) berpengaruh yang positif terhadap penyaluran pembiayaan di bank umum syariah.

Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.8. Ditunjukkan pada tabel tersebut bahwa Koefisien regresi X1 (KPMM) dari perhitungan linier berganda dapat dilihat 405795.565 hal ini berarti setiap ada peningkatan KPMM sebesar 1 poin maka volume Pembiayaan akan meningkat sebesar 405795.565. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghofur W (2001) yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Rasio Keuangan Bank Terhadap Keputusan Pembiayaan Bank Syariah”. Kesimpulan dari penelitian Muhammad Ghofur W menunjukkan bahwa rasio permodalan berpengaruh negatif terhadap penyaluran

pembiayaan dan variabel tersebut membutuhkan waktu (kelambanan) untuk mempengaruhi penyaluran pembiayaan secara positif.

1.3.1.2 Pengaruh rasio kualitas aset (KAP) terhadap penyaluran pembiayaan di bank umum syariah

Rasio kualitas aset (KAP) merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur kualitas aktiva produktif bank syariah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik kualitas aktiva produktif bank. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS ver. 17.00 dapat diketahui bahwa uji parsial untuk variabel X1 (KAP) diperoleh t_{hitung} sebesar 4.105 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih besar 0,05 ($0,000 > 0,05$) sehingga H_0 diterima dan menolak H_a . Maka tingkat KAP berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Bank umum syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa Koefisien regresi X2 (KAP) dari perhitungan linier berganda dapat dilihat 810945.655 hal ini berarti setiap ada peningkatan KAP sebesar 1 poin maka volume pembiayaan akan naik sebesar 810945.655 juta.

1.3.1.3 Pengaruh rasio rentabilitas (NOM) terhadap penyaluran pembiayaan di bank umum syariah

Berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa tingkat rasio rentabilitas (NOM) tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan di bank umum syariah . Dapat dilihat pada tabel 4.11 yang menunjukkan bahwa uji parsial untuk variabel X1 (NOM) diperoleh t_{hitung}

sebesar -0.366 dengan signifikansi 0,716. Nilai signifikansi lebih besar 0,05 ($0,716 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan menerima H_a . Nilai signifikan sebesar 0.716 dan koefisien regresi variabel -10006.380.

Tanda parameter negatif pada koefisien X_3 sebesar -10006.380 menunjukkan bahwa jika tingkat rasio rentabilitas (NOM) naik sebesar 1 poin maka akan terjadi penurunan terhadap besarnya pembiayaan sebesar Rp. 10006.380 juta. Begitupun sebaliknya jika tingkat rasio rentabilitas (NOM) mengalami penurunan sebesar 1 poin maka akan terjadi kenaikan terhadap besarnya pembiayaan sebesar Rp. 10006.380 juta. Dengan demikian antara Tingkat NOM dan volume pembiayaan pada bank umum syariah terjadi hubungan negatif. Hal ini sesuai dalam teori permintaan dimana ketika harga barang naik maka permintaan akan barang tersebut menurun. Dalam penelitian ini ketika tingkat NOM itu naik maka penyaluran pembiayaan bank umum syariah akan mengalami penurunan. Ini berarti kondisi profitabilitas debitur yang tercermin dalam margin labanya tidak berpengaruh secara statistik terhadap penyaluran kredit, karena laba yang digunakan berasal dari laba pada tahun-tahun lalu.

1.3.1.4 Pengaruh rasio likuiditas (STM) terhadap penyaluran pembiayaan di bank umum syariah

Pada uraian berikut ini akan dibahas hasil perhitungan pada tabel 4.12. pada tabel tersebut menunjukkan bahwa uji parsial untuk variabel X_1 (STM) diperoleh t_{hitung} sebesar 4.859 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih besar 0,05 ($0,000 > 0,05$) sehingga H_0

diterima dan menolak H_a . Maka tingkat STM berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Bank umum syariah.

Berdasarkan perhitungan dengan regresi berganda bahwa koefisien X_4 sebesar 538185.501 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pada rasio likuiditas (STM) sebesar 1 poin maka akan terjadi kenaikan pula pada besarnya pembiayaan sebesar Rp. 538185.501 juta. Begitupun sebaliknya jika terjadi penurunan tingkat rasio likuiditas (NOM) sebesar 1 poin maka akan terjadi penurunan juga terhadap pembiayaan sebesar Rp. 538185.501 juga. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan Muhammad Ghofur W (2001) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh secara negatif terhadap penyaluran pembiayaan, dimana pada saat terjadi peningkatan rasio likuiditas malah akan mengurangi besarnya pembiayaan yang diberikan oleh BMI.

1.3.1.5 Pengaruh rasio KPMM, KAP, NOM, dan STM terhadap penyaluran pembiayaan di bank umum syariah

Berdasarkan uji F secara bersama-sama variabel tingkat rasio KPMM, KAP, NOM, dan STM terhadap pemberian pembiayaan di bank umum syariah berpengaruh dengan F_{hitung} sebesar 8.856 dengan nilai signifikan 0,000, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan menolak H_a . Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan bank syariah ini secara internal sangat dipertimbangkan, sehingga dalam penyaluran pembiayaan bank umum syariah itu sangat mempengaruhi penyaluran pembiayaan.